

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator makroekonomi utama yang merefleksikan keberhasilan upaya pembangunan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Konsep ini menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dari periode ke periode, yang umumnya dilihat melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil (Patta Rapanna & Yana Fajriah, 2018). PDB berfungsi sebagai instrumen pengukuran fundamental untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kinerja perekonomian pada skala nasional (BPS, 2016). Negara-negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta memperluas peluang ketenagakerjaan (Maki, 2015).

Dalam konteks regional Asia Tenggara, negara-negara utama seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina berperan sebagai penggerak utama perekonomian ASEAN. Menurut laporan Bank Dunia (2023), kontribusi kelima negara tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) total ASEAN melebihi 85% dan didasarkan pada fenomena empiris bahwa kelima negara tersebut mengalami dinamika pertumbuhan yang paling fluktuatif dan signifikan di kawasan ASEAN, terutama saat krisis 1997–1998, 2008–2009, dan pandemi 2020.

Namun, fenomena di lima negara ASEAN menunjukkan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan teori. Berdasarkan World Development Indicators (World Bank, 2024), pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina mengalami fluktuasi sepanjang 1995–2024, terutama akibat krisis Asia tahun 1997–1998, krisis keuangan global 2008–2009, dan pandemi COVID-19 pada 2020. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang sama pada setiap negara.

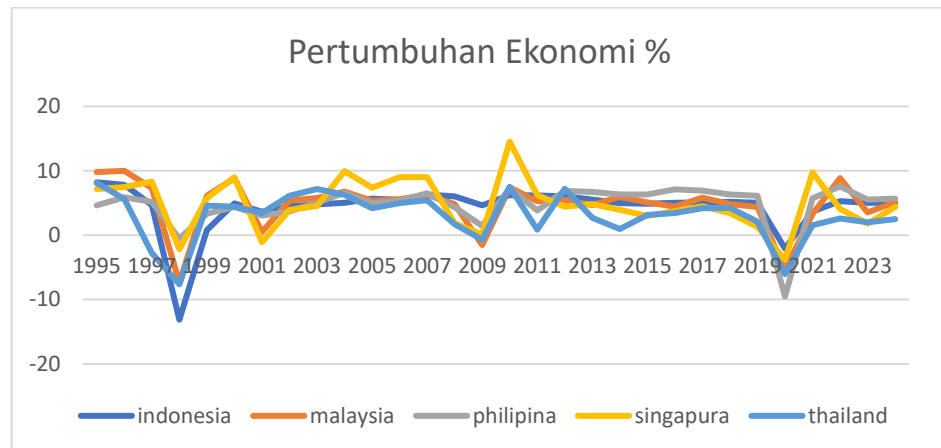
Salah satu faktor yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Menurut Mankiw (2021), inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli, meningkatkan ketidakpastian, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, fenomena di ASEAN menunjukkan kondisi yang berbeda. Sebagai contoh menurut data World Bank (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Filipina mengalami inflasi sekitar 5,8%, tetapi pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 7,6%. Sementara itu, Thailand memiliki inflasi sekitar 6,1%, namun pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 2,5%. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagaimana dijelaskan dalam teori.

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan data World Bank (2023), Singapura menjadi negara dengan arus Foreign Direct Investment (FDI) terbesar di ASEAN pada tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonominya sekitar 3,8%, lebih rendah dibandingkan Filipina yang

hanya menerima FDI lebih kecil tetapi mampu tumbuh sekitar 7,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya investasi belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut North (1990), kualitas institusi yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah Corruption Perceptions Index (CPI). Data Transparency International (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Singapura memperoleh skor CPI 84, tertinggi di ASEAN, sedangkan Indonesia memperoleh skor 37 dan Filipina 33. Meskipun demikian, berdasarkan World Bank (2024), pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Filipina pada beberapa tahun pascapandemi justru lebih tinggi dibandingkan Singapura. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara dengan kualitas institusi yang lebih baik tidak selalu memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat adanya beberapa ketidaksesuaian antara teori dengan kondisi empiris mengenai pengaruh inflasi, investasi, dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh inflasi, investasi, dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi pada lima negara ASEAN periode 1995–2024 masih penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif.



Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Lima Negara Asean Tahun 1995 – 2024

Sumber : World Bank (2024) diolah

Data pada Gambar 1.1 menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi lima negara besar di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, selama periode tahun 1995 hingga 2024. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, tercermin dari capaian Indonesia (8,22%) dan Malaysia (9,82%) pada 1995. Namun, pada tahun 1997–1998 mengalami kontraksi tajam, terutama di Indonesia (-13,13%), Thailand (-7,63%), dan Malaysia (-7,36%), yang mencerminkan penurunan drastis aktivitas ekonomi dan investasi.

Memasuki awal 2000-an, proses pemulihan berlangsung dengan pola yang berbeda antarnegara. Indonesia dan Malaysia kembali mencatat pertumbuhan relatif stabil (masing-masing sekitar 4–6% dan di atas 5%), Filipina menunjukkan stabilitas dengan puncak 7,15% pada 2016, sementara Singapura mengalami volatilitas tinggi akibat ketergantungan pada perdagangan global, termasuk

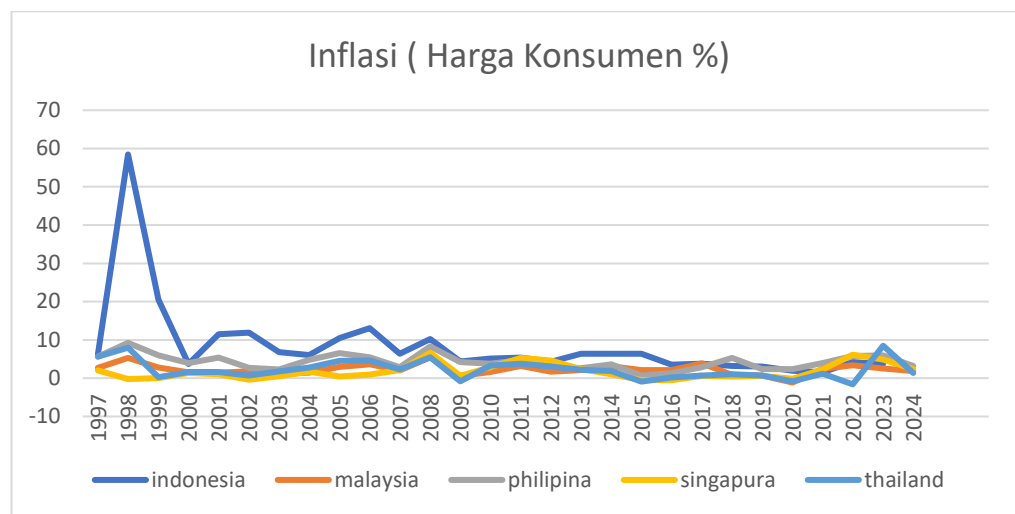
pertumbuhan 14,52% pada 2010 dan kontraksi -3,81% pada 2020. Thailand cenderung tumbuh lebih moderat dan stagnan pada kisaran 2–4% dalam dekade terakhir.

Krisis global pada tahun 2008–2009 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 kembali menekan pertumbuhan, dengan kontraksi terdalam terjadi di Filipina (-9,52%) dan Malaysia (-5,46%). Meskipun demikian, periode 2021–2022 menunjukkan pemulihan signifikan, di mana Malaysia dan Filipina kembali tumbuh di atas 7%, sementara Indonesia mempertahankan stabilitas pertumbuhan di atas 5%. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana masing-masing negara ASEAN menyesuaikan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global sepanjang hampir tiga dekade terakhir (Yaqin, dkk (2024)).

Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu linier. Inflasi yang terkendali dalam batas kewajaran dapat memberikan stimulus bagi ekspansi ekonomi. Akan tetapi, tingkat inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat, mempertinggi ongkos produksi, menimbulkan ketidakpastian pasar, dan pada akhirnya menghambat investasi serta menekan hasil produksi. Fenomena-fenomena tersebut secara kolektif akan berujung pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi. (Samuelson & Nordhaus, 2009).

Perbedaan dampak inflasi ini juga tercermin dalam temuan empiris. Berdasarkan penelitian Ningsih et al. (2021) serta Purnomo & Wibowo (2024), inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

sehingga menunjukkan bahwa inflasi pada tingkat tertentu mampu mendorong kinerja ekonomi. Sebaliknya, penelitian Rahmawati & Dimas (2023), serta Shelton & (Mandeya & Ho, 2021) mengungkapkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika inflasi berada di atas batas wajar dan menciptakan ketidakstabilan makroekonomi.



Gambar 1. 2 Data Tingkat Inflasi Lima Negara Asean Tahun 1995 – 2024

Sumber : World Bank (2024) diolah

Analisis data inflasi dari lima negara utama di ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, mencakup periode 1995 hingga 2024, memperlihatkan pola pergerakan harga komoditas dan layanan yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini menunjukkan rata-rata persentase peningkatan harga kebutuhan pokok setiap tahun. Secara garis besar, tingkat inflasi yang berlebihan dapat mengikis kekuatan membeli masyarakat, sedangkan inflasi yang sangat minimal atau deflasi dapat mengindikasikan aktivitas ekonomi yang

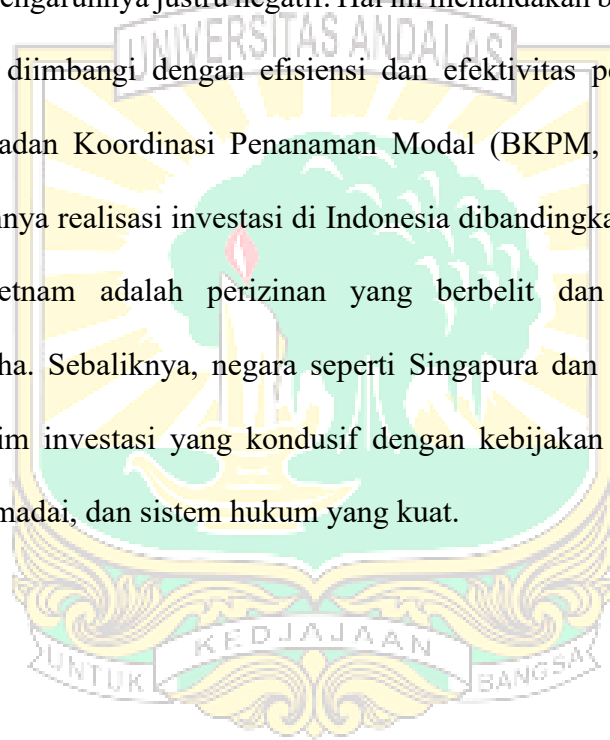
lesu. Oleh karena itu, stabilisasi inflasi menjadi tolok ukur krusial dalam mengevaluasi kondisi dan performa ekonomi suatu negara (Rafiqoh et al., 2025)

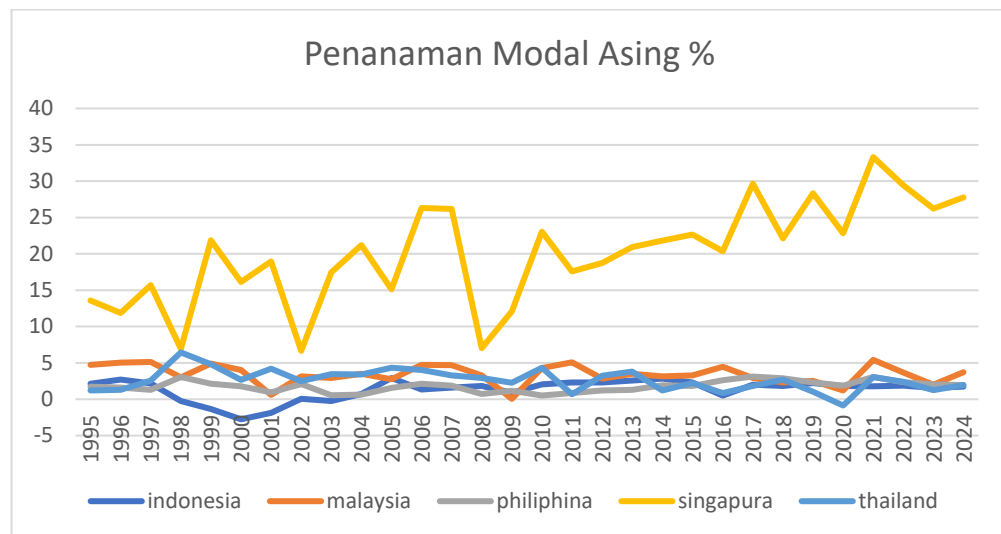
Selama hampir tiga dekade, inflasi di negara-negara ASEAN menunjukkan fluktuasi signifikan, terutama pada periode krisis 1997–1998, 2008–2009, dan pandemi 2020, dengan pola yang berbeda sesuai karakteristik ekonomi dan kebijakan masing-masing negara. Indonesia mencatat inflasi tertinggi dan paling volatil, mencapai 58,45% pada 1998 akibat krisis moneter, sebelum stabil di kisaran 3–6% pascareformasi moneter. Malaysia mempertahankan inflasi relatif rendah (1–4%), dengan lonjakan terbatas pada 2008 (5,44%) seiring kenaikan harga minyak global, mencerminkan efektivitas kebijakan stabilisasi. Filipina berada pada tingkat moderat—5–8% pada 1990-an dan stabil 3–5% sejak 2010—namun meningkat kembali pada 2022–2023 (sekitar 6%). Singapura dan Thailand umumnya memiliki inflasi rendah dan stabil, bahkan mengalami deflasi pada beberapa tahun, meskipun terdampak lonjakan harga global pada 2008 dan pascapandemi, dengan inflasi Thailand mencapai 8,47% pada 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas harga di kawasan sangat dipengaruhi oleh guncangan eksternal dan respons kebijakan domestik.

Faktor berikutnya adalah investasi, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal (*capital formation*) dan transfer teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan dikembangkan oleh Harrod–Domar menegaskan bahwa peningkatan investasi berbanding lurus dengan peningkatan output nasional. Menurut Todaro & Smith (2015), investasi berperan dalam menambah stok modal dan mempercepat proses

pembangunan ekonomi. Dalam konteks ASEAN, investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* memainkan peran strategis, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand yang masih membutuhkan modal eksternal untuk memperluas sektor industri dan infrastruktur.

Dalam penelitian Ningsih et al. (2021) menemukan hasil menarik bahwa meskipun investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, arah pengaruhnya justru negatif. Hal ini menandakan bahwa peningkatan investasi belum diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas penyerapan modal. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2020), salah satu penyebab rendahnya realisasi investasi di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain seperti Vietnam adalah perizinan yang berbelit dan tingginya biaya administrasi usaha. Sebaliknya, negara seperti Singapura dan Malaysia berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan kebijakan pajak kompetitif, infrastruktur memadai, dan sistem hukum yang kuat.





Gambar 1. 3 Penanaman Modal Asing (Investasi) Lima Negara Asean tahun 1995 - 2024

Sumber : World Bank (2024) diolah

Pada pertengahan 1990-an, arus investasi asing langsung (FDI) ke negara-negara ASEAN meningkat signifikan seiring membaiknya ekonomi global dan meningkatnya keterbukaan kawasan. Singapura mencatat FDI tertinggi—13,6% dari PDB pada 1995 dan lebih dari 15% pada 1997—didukung stabilitas politik, infrastruktur maju, dan kebijakan pro-bisnis, sementara Malaysia mempertahankan rata-rata 4–5%. Krisis finansial 1997–1998 kemudian menekan FDI, terutama di Indonesia yang turun hingga -0,25% pada 1998, sedangkan Malaysia dan Singapura mengalami perlambatan lebih moderat; Filipina dan Thailand relatif lebih terkendali.

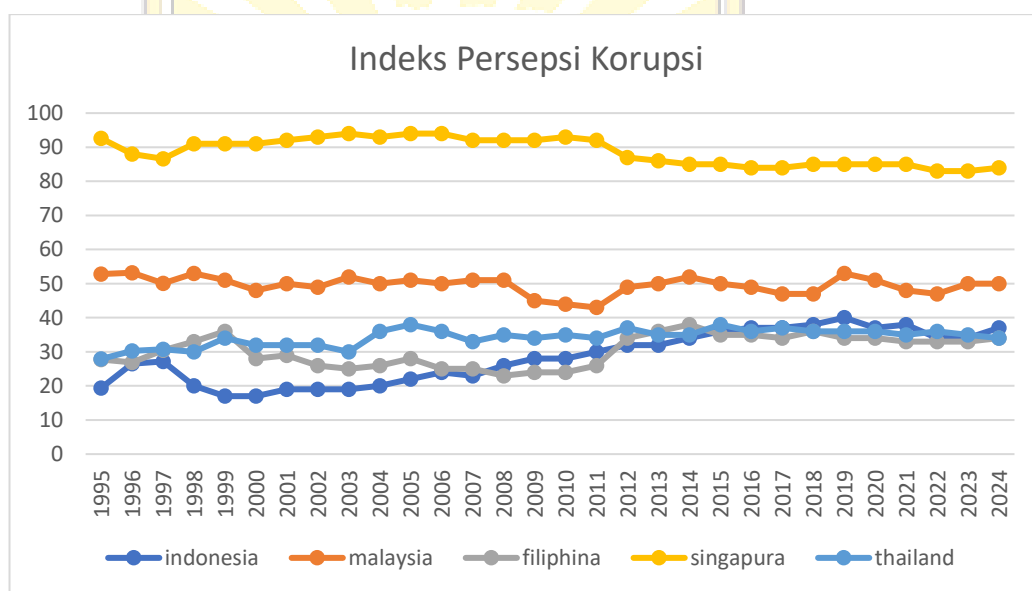
Memasuki 2000-an, pemulihan FDI terjadi secara bertahap. Singapura kembali memimpin dan mencapai puncak 33,30% pada 2022. Indonesia mengalami pemulihan lebih lambat dengan FDI negatif pada 2000–2001, sebelum stabil di kisaran 1–3% pascareformasi ekonomi dan stabilitas politik meningkat. Filipina

menunjukkan tren kenaikan hingga di atas 3% pada 2022, Malaysia bertahan pada 3–5% dan pulih pascapandemi (5,41% pada 2022), sedangkan Thailand cenderung fluktuatif—sempat negatif pada 2021 (-0,85%) akibat pandemi dan ketidakpastian politik, namun mulai pulih seiring perbaikan kondisi global. Fenomena ini menegaskan bahwa arus FDI di ASEAN sangat dipengaruhi oleh stabilitas domestik dan guncangan eksternal.

Selain inflasi dan investasi, variabel non-ekonomi seperti korupsi juga berperan penting dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat (KPK ACLC, 2016). Menurut Klitgaard (2019), tingginya tingkat korupsi menurunkan efisiensi ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, dan menghambat distribusi sumber daya produktif. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) (Pradipto, 2016).

Secara teoritis, kondisi ini dapat dijabarkan melalui teori institusional dan tata kelola pemerintahan (*governance theory*), di mana tingkat korupsi sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusi negara dalam menegakkan hukum, transparansi anggaran, serta partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Negara dengan sistem pemerintahan yang kuat, stabil, dan transparan akan memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih tinggi (artinya korupsi rendah), sedangkan negara dengan sistem hukum lemah, ketergantungan tinggi pada elite politik, dan birokrasi tidak efisien akan cenderung memiliki nilai indeks yang rendah (Purnama, 2022).

Ningsih et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan skor IPK Indonesia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Gründler & Potrafke (2019), hubungan antara Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan pertumbuhan ekonomi bersifat negatif dan signifikan. Peningkatan tingkat korupsi—yang ditunjukkan oleh kenaikan skor CPI terbalik—akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut menurut (Al Hazmi, 2023) menemukan Indeks Persepsi korupsi (IPK) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. 4 Data Indeks Persepsi korupsi Lima Negara Asean tahun 1995 – 2024

Sumber : Transparency International (2024) diolah

Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) periode 1995–2024 menunjukkan perbedaan signifikan kualitas tata kelola di lima negara ASEAN. Sejak 2012, Transparency International mengubah skala Corruption Perceptions Index (CPI) dari 0–10 menjadi 0–100. Oleh karena itu, secara teknis data sebelum 2012 dapat

dikonversi dengan metode *rescaling linear*, hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu dari (Ningsih et al., 2021). Singapura secara konsisten mencatat skor tertinggi (83–94 %) dengan rata-rata 88,74%, merefleksikan integritas institusi yang kuat. Sebaliknya, Indonesia (rata-rata 28,37), Filipina (30,40 %), dan Thailand (34,20 %) berada pada tingkat relatif rendah dengan tren fluktuatif, sementara Malaysia menempati posisi menengah (49,57 %) meskipun cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Perbedaan yang tajam dalam kualitas tata kelola dan tingkat korupsi di ASEAN mengindikasikan adanya kesenjangan institusional yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi masing-masing negara. Negara dengan IPK tinggi, seperti Singapura, sejauh ini berhasil menciptakan arus investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di lain pihak, negara dengan IPK rendah berisiko menghadapi penurunan produktivitas dan investasi akibat melemahnya kepercayaan pelaku usaha internasional (Abed & Davoodi, 2000)

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi lima negara besar ASEAN — Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina — yang dibahas dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu inflasi, investasi, dan tingkat korupsi. Inflasi yang terkendali mampu menciptakan stabilitas harga dan mendorong iklim investasi yang sehat, sedangkan inflasi tinggi dapat menekan daya beli dan menghambat pertumbuhan (Situmorang & Siahaan, 2024). Investasi, khususnya penanaman modal asing, menjadi pendorong utama pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan lapangan kerja, namun keberhasilannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang jelas.

Sementara itu, tingkat korupsi yang tinggi terbukti menurunkan efisiensi ekonomi dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, temuan ini penting untuk menganalisis secara empiris bagaimana ketiga variabel tersebut saling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di negara-negara besar ASEAN selama periode 1995–2024, serta untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika stabilitas makroekonomi berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara inflasi, investasi, dan indeks persepsi korupsi dengan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan berbeda antarnegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komparatif lintas negara untuk memahami bagaimana ketiga variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN dalam rentang waktu yang lebih panjang, yakni 1995–2024. Periode ini mencakup berbagai fase penting, mulai dari krisis moneter Asia, integrasi ekonomi ASEAN, hingga pemulihan pascapandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN pada periode 1995–2024?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN pada periode 1995–2024?

3. Bagaimana pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN pada periode 1995–2024?
4. Apakah inflasi, investasi, dan indeks persepsi korupsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN pada periode 1995 – 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN.
3. Menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN.
4. Menganalisis pengaruh inflasi, investasi, dan indeks persepsi korupsi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara besar ASEAN selama periode 1995–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur dan analisis ilmiah di ranah ekonomi makro dan pembangunan. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti dampak variabel makroekonomi dan kelembagaan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, riset ini dapat berfungsi sebagai acuan empiris untuk mengapresiasi relasi antara inflasi, investasi, dan indeks persepsi korupsi dalam kerangka perekonomian terbuka yang melibatkan berbagai negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

1. Pemerintah dan pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN, dalam merumuskan strategi ekonomi yang mampu menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan efektivitas investasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
2. Investor dan pelaku ekonomi, sebagai suatu hal yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan kondisi makroekonomi dan kualitas institusional negara tujuan.
3. Akademisi dan peneliti, sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun global.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang relevan mengenai inflasi, investasi, indeks persepsi korupsi, serta pertumbuhan ekonomi, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis yang digunakan (misalnya regresi panel data), serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data terkait variabel penelitian, serta interpretasi dan pembahasannya yang dikaitkan dengan teori maupun temuan empiris sebelumnya. Bab ini menjadi bagian inti yang menunjukkan kontribusi penelitian terhadap analisis ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang ditujukan bagi pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya. Bab ini memberikan ringkasan dan implikasi atas temuan yang diperoleh

